

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang program TRI 1975 dengan tujuan meningkatkan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani tebu. Program tersebut merupakan perubahan yang direncanakan oleh pemerintah, maka hendaknya sistem manajemen perubahan sosial benar-benar disiapkan secara mantap agar tujuan dalam program tersebut bisa tercapai. Mekanisme pelaksanaan Program TRI di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dibentuk dari tingkat kabupaten sampai dengan kelompok tani yang melibatkan beberapa unsur diantaranya UPP-TRI, PG, BRI, KUD dan kelompok tani. Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam modal agar para petani lebih bergairah untuk menanam tebu. Hal tersebut menandakan bahwa telah ada mekanisme pengawasan yang baik dan sistem hierarki yang jelas oleh pemerintah.

Namun manajemen/kelembagaan TRI kurang berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan antara lain koordinasi antar lembaga masih kurang dalam pembinaan kepada kelompok tani sehingga kadang-kadang menyulitkan terhadap pencairan kredit kepada petani. Keterlambatan ini mempengaruhi terhadap mutu pekerjaan kelompok tani dalam hal pemeliharaan tanaman tebu. Selain itu, pemerintah belum bisa menekan harga pupuk yang begitu mahal, sehingga petani memperoleh kualitas pupuk yang jelek yang mengakibatkan mutu tebu menjadi rendah. Distribusi tebu dari petani ke pabrik gula tidak berjalan dengan lancar misalnya dalam proses tebang angkut seringkali terjadi keterlambatan dalam jadwal tebang. Dalam hal ini pemerintah tidak memfasilitasi dengan baik dalam mendistribusikan tebu dari petani ke pabrik gula.

Selama kurun waktu 1975-1997 atau sejak dilaksanakannya program TRI, Jumlah produksi TRI di wilayah PG. Karangsung Kecamatan Karangsembung menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Penurunan jumlah produksi tebu terjadi karena mutu pemeliharaan tanaman yang masih rendah disamping juga faktor alam

yang cukup berpengaruh yaitu iklim yang tidak menentu dan banyaknya tanaman yang terserang hama sehingga menyebabkan gagal panen serta kurang terlibatnya secara aktif semua anggota kelompok TRI yang sebagian besar masih dipraktikkan dalam bentuk kelompok kolektif dimana hampir semua pekerjaan ditangani sendiri oleh ketua kelompok yang mengakibatkan partisipasi petani kurang.

Kesediaan petani dalam mengikuti program TRI lebih banyak karena unsur keterpaksaan dari pada inisiatif sendiri. Dalam hal ini yang lebih menonjol dan berperan ialah para ketua kelompok dari para petani tebu. Para petani menginginkan sebaiknya Inpres tersebut dicabut agar petani tebu tidak menderita lagi. Sebagai bukti petani menderita adalah adanya kenyataan bahwa program tersebut telah diselewengkan dan banyak pihak yang diuntungkan, seperti banyaknya lahan petani yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Program tersebut cenderung membawa kepentingan ekonomi-politik negara atas kebijakan tujuan industri gula secara nasional daripada pemihakan terhadap nasib petani tebu. Selama Inpres TRI tidak dicabut petani tebu tetap menderita dan sengsara, karena dalam prakteknya segala hal menyangkut tebu mulai dari penyediaan lahan, proses tebang dan angkut tebu serta penggilingan diatur dan dikuasai oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan kenyataan bahwa kehidupan petani belum beranjak dari kemiskinan.

Pelaksanaan program TRI di Kecamatan Karangsembung telah mengalami berbagai hambatan, Peran Pabrik gula dalam hal ini dirasa kurang maksimal dalam rangka memberikan penyuluhan serta sosialisasi program terhadap petani oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman tebu antara lain melakukan pembinaan terhadap kelompok tani yang dilakukan oleh UPP-TRI Karangsuwung guna menumbuhkan kemauan dan kemampuan petani sehingga timbul peran aktif mereka dalam menangani program TRI. Selain itu, petani TRI telah menerapkan teknologi anjuran dalam Sapta Usahatani Tebu yang merupakan pembaharuan dalam teknologi budidaya tanaman tebu, sehingga pada tahun 1983-1990 jumlah produksi tebu yang dikelola beberapa kelompok tani di Kecamatan Karangsembung mulai mengalami peningkatan.

Adapun perubahan sosial ekonomi yang dialami para petani tebu di Karangsembung yaitu mengalami peningkatan pendapatan, akan tetapi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pendapatan yang diperolehnya itu merupakan hasil kerja keras dalam mengikuti anjuran Sapta Usaha tani dari UPP TRI Karangsuwung dan usaha sampingan lainnya. Selain berdampak pada peningkatan pendapatan, petani tebu juga mengalami perubahan sosial diantaranya petani sudah mempunyai suatu pemahaman yang lebih baik lagi kaitannya dengan inovasi petani dalam menanam tebu, serta timbul rasa kebersamaan diantara petani untuk menjadi seorang petani tebu yang baik dalam kelompok taninya.

Kurang mantapnya penyelenggaraan program TRI sesuai tujuan dan sistem sasarannya, kekacauan organisasi, sempitnya pemilikan lahan para petani, besarnya resiko usahatani TRI, tampak menekan minat petani mengikuti program TRI serta menghambat berjalannya proses alih teknologi. Program TRI itu sebenarnya program yang bagus, akan tetapi bagi petani dengan model/sistem yang seperti itu belum nampak dimengerti oleh seluruh petani di Kecamatan Karangsembung mengingat kemampuan yang dimiliki dari seorang petani terbatas. Program dari pemerintah itu belum tentu bisa memberikan dampak yang positif terhadap situasi keadaan yang ada di Karangsembung, sehingga Program TRI di Kecamatan Karangsembung dapat dikatakan kurang sepenuhnya berhasil.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, usaha tani TRI di Kecamatan Karangsembung belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon agar lebih memperhatikan nasib para petani tebu dan buruh tani tebu yang selama ini belum terentaskan. Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakatnya khususnya para petani diharapkan mampu menjadi petani yang dapat menghasilkan hasil bumi yang berkualitas. Adapun hasil penelitian ini, secara umum penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi petani dan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan sistem TRI. Dalam pemaparan program TRI petani kurang

bisa memahami intensifikasi sebagai pokok utama kegiatan, inovasi dalam hal pertanian ini dinilai terlalu sulit dilakukan dengan keadaan petani yang masih terbatas. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa menjadikan budidaya tebu sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal (Mulok) yang ada di sekolah penelitian ini diharapkan bisa masuk kedalam mata pelajaran yang ada di SMK-SMK yang berbasis pertanian atau mata pelajaran di SMA yang berkaitan tentang Kebijakan Orde baru. Langkah ini bertujuan agar budidaya tebu dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap dilestarikan, sehingga masyarakat sekitar khususnya generasi muda tidak hanya mengenal kota Cirebon sebagai kota udang tetapi tebu juga merupakan komoditas yang diperhitungkan di Cirebon.

Bagi para petani diharapkan dapat lebih jauh terlibat dalam budidaya tebu, agar produksi tebu tetap stabil dan bisa memenuhi konsumsi dalam negeri. Selain itu, diharapkan petani sudah memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan taraf hidupnya, karena semakin majunya perkembangan zaman, maka pola pikir masyarakat semakin berkembang. Misalnya dengan menyekolahkan anak-anaknya minimal hingga ke jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU/SMK), bahkan saat ini sudah banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya hingga Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila seluruh pihak baik dari pihak pemerintah, perkebunan yang bersangkutan, beserta seluruh lapisan masyarakat bersama-sama untuk mencari dan menemukan solusi terbaik bagi kelangsungan usahatani tebu agar tidak terjadi kepunahan. Jangan biarkan permasalahan ini berlarut-larut hingga akhirnya semua pihak merasa dirugikan. Kepada seluruh lapisan masyarakat Cirebon khususnya masyarakat Karangsembung untuk tetap terus membantu melestarikan budidaya tebu agar produksinya terus meningkat dan kehidupan petani bisa lebih sejahtera.